

ANALISIS VALUE FOR MONEY PENGELOLAAN DANA DESA BIDANG KESEHATAN DESA ALAS MALANG

Rachmandika Rayfanelda Ardani¹, Rini Widianingsih^{2*}, Ateik Sri Purwati³,
Meilena Saemilasari⁴

¹Universitas Jenderal Soedirman, rachmandika.ardani@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

^{2*}Universitas Jenderal Soedirman, rini.widianingsih@unsoed.ac.id, Indonesia

³Universitas Jenderal Soedirman, atiek.purwati@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara yang lain, hal tersebut terjadi dikarenakan permasalahan kesehatan di Indonesia yang meliputi berbagai lapisan masyarakat salah satunya masyarakat di Desa Alas Malang. Pemerintah Desa Alas Malang telah mengupayakan program untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dengan menggunakan dana desa. penggunaan dana desa tersebut harus diukur kinerjanya apakah telah maksimal penggunaannya, salah satu pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja berbasis *value for money* yaitu pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk menilai kinerja pengelolaan dana desa bidang kesehatan dengan fokus pada program yang diselenggarakan oleh Pos Kesehatan Desa (PKD) pada Desa Alas Malang Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Aspek yang dianalisis adalah pengelolaan dana desa bidang kesehatan di Desa Alas Malang dengan pengukuran kinerja *value for money*, serta wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa bidang kesehatan sudah ekonomis, efisien, efektif dikarenakan tidak terdapat pemborosan anggaran dan tujuan disalurkan dana desa sudah tercapai, meskipun masih terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana terbatas pandemi *covid-19*.

Kata Kunci : Dana Desa, Pos Kesehatan Desa, *Value for Money*

1. Pendahuluan

Permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Berdasarkan pada indikator perawatan kesehatan fisik dan kesehatan mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan, serta pencegahan wabah atau penyakit menunjukkan bahwa pada indeks kesehatan dunia, Indonesia menempati peringkat yang cukup rendah yaitu peringkat 97 dari 167 negara pada tahun 2020 data dari (*The Legatum Prosperity Index TM*, 2020) dan peringkat 80 dari 167 negara pada tahun 2021 data dari (*The Legatum Prosperity Index TM*, 2021).

Permasalahan kesehatan juga dialami oleh masyarakat pedesaan, salah satunya merupakan Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Permasalahan kesehatann

di Desa Alas Malang yaitu masih terdapat keluarga yang memiliki anak dengan gizi buruk. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan terdapat budaya pada masyarakat yang tidak memperhatikan gizi pada anak. Data yang didapatkan dari puskesmas didapati bahwa pada tahun 2019 masih terdapat anak di Desa Alas Malang yang berada di bawah garis aman pemenuhan gizi. Kurang luasnya akses informasi kesehatan yang diterima oleh masyarakat Desa Alas Malang juga menjadi permasalahan. Hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat terhambat untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Permasalahan kesehatan lainnya adalah masih terdapat masyarakat yang buang air besar sembarangan, dimana hal tersebut akan mempermudah penyebaran penyakit yang menular

Permasalahan kesehatan di Desa Alas Malang telah berusaha ditangani oleh Pemerintah Desa Alas Malang melalui berbagai program kesehatan melalui salah satu lembaga desa yaitu Pos Kesehatan Desa (PKD). Pelaksanaan kegiatan serta pengadaan fasilitas untuk Pos Kesehatan Desa menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah rincian data program serta realisasi penggunaan dana desa untuk Pos Kesehatan Desa pada tahun 2020 dan 2021:

Tabel 1.1 Realisasi Dana Desa Pos Kesehatan Desa

Program	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	19.040.000	13.750.000
Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	25.085.000	27.427.000
Total	44.125.000	41.177.000

Penggunaan dana desa untuk program pos kesehatan desa sebesar 4% dari total dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Alas Malang merupakan nilai yang cukup besar. Penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Alas Malang harus dapat di pertanggung jawabkan kinerja penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat Desa Alas Malang.

Value for money merupakan salah satu pengukuran kinerja sektor publik yang didasarkan pada elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mahmudi, 2015). Tujuan dari pengukuran kinerja *value for money* yaitu, ekonomis dalam alokasi dan pengadaan keperluan sumber daya, efisiensi mengenai bagaimana sumber daya digunakan, dan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Studi terbaru telah menjabarkan penilaian kinerja berbasis *value for money* yang telah diterapkan pada organisasi sektor publik (lihat: Ardila & Putri, 2015; Dwi Andayani, 2019; Harmain et al., 2019; Hatta et al., 2021; Indrayani & Khairunnisa, 2018; Kristiani & Supadmini, 2018; Liando et al., 2014; Polii et al., 2020; G. Y. N. Sari et al., 2022; P. Sari et al., 2021; Seran, 2021; Susi Maryanti & Munandar, 2021; Wuwungan1 et al., 2019; Yulitiawati & Rusmidarti, 2021). Pengukuran kinerja *value for money* membawa dampak bagi organisasi sektor publik untuk mengelola dana publik dari masyarakat menjadi lebih ekonomis, efisien, efektif

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berfokus pada analisis *value for money* pengelolaan dana desa bidang kesehatan yaitu program-program pos kesehatan desa di Desa Alas Malang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengelolaan dana desa bidang kesehatan (PKD) pada Desa Alas Malang tahun 2020 dan 2021 telah terlaksana sesuai dengan pengukuran konsep *value for money* yaitu secara ekonomis, efisien, efektif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Value for Money

Value for money merupakan pengukuran kinerja yang digunakan pada organisasi sektor publik didasarkan pada tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). *Value for money* secara spesifik digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik dikarenakan organisasi sektor publik yang bersifat *intangibile* atau tidak berorientasi pada laba.

2.1.1 Ekonomi

Menurut (Mardiasmo, 2018) ekonomi merupakan pembelian *input* seperti tenaga kerja, infrastruktur, bahan baku dengan kualitas terbaik yang dapat diperoleh dan harga terbaik yang dimungkinkan. Elemen ekonomi diukur dengan membandingkan *input* atau masukan yaitu anggaran belanja dengan *input value* yaitu realisasi belanja.

$$\text{Ekonomi: } \frac{\text{input (anggaran belanja)}}{\text{harga input (realisasi belanja)}}$$

2.1.2 Efisiensi

Menurut (Mardiasmo, 2018) efisiensi mempunyai pengertian yang berkaitan dengan produktivitas. Efisiensi organisasi sektor publik diukur dengan membandingkan *output* atau keluaran yaitu realisasi belanja yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan (*cost of output*) yaitu realisasi anggaran.

$$\text{Efisiensi: } \frac{\text{output (realisasi belanja)}}{\text{input (realisasi pendapatan)}}$$

2.1.3. Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2018) efektivitas didasarkan hubungan dalam mencapai tujuan atau hasil guna berupa target kebijakan. Efektivitas juga dapat dikatakan kaitannya antara *output* berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu dicapai. Efektivitas suatu organisasi diukur dengan membandingkan *outcome* dan *output*.

$$\text{Efektivitas: } \frac{\text{outcome (realisasi anggaran)}}{\text{output (realisasi belanja)}}$$

2.2 Dana Desa

Dana desa merupakan dana bagi seluruh desa yang terdapat di wilayah Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten sesuai dengan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun (2014). Dana desa digunakan untuk mendanai program atau penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan dan kewenangan dari desa.

2.2.1 Prioritas Dana Desa Bidang Kesehatan

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun (2014), prioritas dari penggunaan dana desa diwujudkan dalam 8 tipologi desa dan 18 SDGs desa, yang beberapa diantaranya berfokus pada kesehatan. Tahun 2020 mengacu Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 (2019) dan tahun 2021 mengacu Permendes PDTT No.13 Tahun (2020), dimana kedua peraturan menteri tersebut mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 dan 2021 salah satunya merupakan bidang kesehatan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang memiliki landasan yaitu filsafat postpositivisme, digunakan dalam meneliti kondisi obyek secara alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dari penelitian ini (Sugiyono, 2014). Penelitian deskriptif akan menyajikan suatu gambaran tentang masalah sosial yang terjadi.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa bidang kesehatan serta orang yang terkena dampak dari pengelolaan dana desa tersebut, yaitu perangkat desa, bidan desa, kader kesehatan desa, dan masyarakat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan dana desa pos kesehatan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya akan dilakukan reduksi data dari anggaran dan realisasi dana desa pos kesehatan desa menggunakan metode *value for money* meliputi ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta reduksi data dari hasil wawancara untuk mengetahui efektivitas.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai uji keabsahan data. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi untuk melakukan *checking* data dari banyak sumber atau informan penelitian dengan berbagai teknik dan rentang waktu (Sugiyono, 2014).

4. Hasil

Penelitian ini mengukur kinerja pengelolaan dana desa pos kesehatan desa pada Desa Alas Malang tahun 2020 dan 2021 menggunakan metode pengukuran kinerja *value for money* yang didasarkan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

4.1 Pengukuran Ekonomi

Ekonomi 2020: $\frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$

$$: \frac{\text{Rp.77.185.000}}{\text{Rp.44.125.000}} \times 100\%$$

: 174%

Ekonomi 2021: $\frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$

: $\frac{\text{Rp.112.002.000}}{\text{Rp.41.177.000}} \times 100\%$

: 272%

- > 100% : ekonomis
- 85 s.d. 100%: cukup ekonomis
- 65 s.d. 84% : kurang ekonomis
- < 65% : tidak ekonomis

Presentase diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 pengelolaan dana desa untuk PKD di Desa Alas Malang bersifat sangat ekonomis dikarenakan presentase yang melebihi 100%.

4.2 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi 2020: $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$

: $\frac{\text{Rp. 44.125.000}}{\text{Rp. 77.185.000}} \times 100\%$

: 57%

Efisiensi 2021 : $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$

: $\frac{\text{Rp. 62.857.000}}{\text{Rp. 112.002.000}} \times 100\%$

: 56%

Keterangan

- < 90% : sangat efisien
- 90 s.d. 99% : efisien
- 100% : cukup efisien
- >100% : tidak efisien

Hasil diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 57% menjadi 56%.

4.3 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas 2020: $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$

$$: \frac{Rp.77.185.000}{Rp.77.185.000} \times 100\%$$

: 100%

Efektivitas 2021: $\frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$

$$: \frac{Rp. 112.002.000}{Rp. 112.002.000} \times 100\%$$

: 100%

Keterangan

- ≥ 100% : efektif
- 85 s.d. 99% : cukup efektif
- 65 s.d. 84% : kurang efektif
- ≤ 65% : tidak efektif

Perhitungan untuk nilai efektifitas pada tahun 2021 dan 2020 menghasilkan nilai 100% yang berarti untuk tahun 2021 dan 2020 bernilai efektif.

5. Pembahasan

Berdasarkan pengukuran *value for money* pada anggaran dan realisaasi dana desa yang telah dilakukan serta, wawancara untuk mengetahui apakah dana desa yang disalurkan untuk pengelolaan bidang kesehatan di PKD telah berjalan efektif yaitu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan melalui program yang telah dilaksanakan.

Pengukuran *value for money* yang digunakan yaitu untuk tingkat ekonomi berdasarkan perbandingan anggaran belanja dengan realisasi belanja. Tingkat efisiensi yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Tingkat efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Hasil pengukuran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1 Hasil Value for Money

Pengukuran <i>value for money</i>	2020	2021
Ekonomi	174%	272%
Kriteria	Ekonomis	Ekonomis
Efisiensi	57%	56%
Kriteria	Efisien	Efisien
Efektivitas	100%	100%
Kriteria	Efektif	Efektif

5.1 Ekonomi

Pengukuran dari tingkat ekonomi untuk kinerja dana desa bidang kesehatan yaitu PKD pada tahun 2020 dan 2021 berada pada tingkat ekonomis hal ini karena hasil berada pada presentase di atas 100%. Pada tahun 2020 didapatkan hasil tingkat ekonomis pada presentase 174%. Pada tahun 2021 didapatkan hasil tingkat ekonomis pada presentase 272%. Selama dua

tahun yaitu tahun 2020 dan 2021 tingkat ekonomi mencapai lebih dari 100%, yang berarti bahwa pemerintah desa telah melakukan penghematan dalam mengelola anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Tingkat ekonomi bertujuan untuk menunjukkan bahwa perolehan sumber daya dengan kualitas yang baik dengan harga terendah.

5.2 Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada pengelolaan dana desa bidang kesehatan (PKD) pada tahun 2020 dan 2021 dikatakan efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi berada pada presentase 57%. Tahun 2021 tingkat efisiensi berada pada presentase 56%. Hal tersebut dikarenakan realisasi belanja yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Realisasi belanja yang jauh lebih kecil ini dikarenakan dana yang tersedia di alihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana dikarenakan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

5.3 Efektivitas

Pengukuran value for money pada tingkat efektivitas untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 menghasilkan kinerja yang efektif. Hal ini berkaitan dengan presentase perhitungan tingkat efektivitas yang diambil dari perbandingan realisasi pendapatan. Hasil tingkat efektivitas pada tahun 2020 pada presentase 100% dan pada tahun 2021 pada presentase 100%. Anggaran yang diajukan pada tahun 2020 sebesar Rp. 77.185.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 112.002.000 terealisasi seluruhnya. Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2020 dan 2021 stagnan.

Efektivitas dalam organisasi sektor publik mengukur tingkat ketercapaian dari tujuan atau outcome yang telah direncanakan dari dijalankannya sebuah kegiatan atau output. Tidak hanya dilihat dari laporan keuangan saja, namun dalam pelaksanaannya harus diperhatikan.

Tujuan dari dialokasikannya dana desa untuk bidang kesehatan yaitu PKD di Desa Alas Malang adalah upaya untuk masyarakat Desa Alas Malang yang lebih peduli terhadap kesehatan baik itu dari kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan. Tujuan lain yaitu mengentaskan permasalahan gizi buruk atau stunting.

Desa Alas Malang telah menetapkan dan menjalankan kegiatan melalui PKD untuk mencapai tujuan seperti yang ditetapkan di atas. Kegiatan yang direncanakan untuk terlaksana oleh PKD pada tahun 2020 dan 2021 untuk bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, pelatihan kader kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan dan pemberian makanan tambahan serta sosialisasi kesehatan yang meliputi sosialisasi kesehatan anak, kebersihan lingkungan, dan penyakit menular.

Kegiatan yang sudah direncanakan oleh PKD pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan munculnya pandemi covid-19. Kendala saat pandemi covid-19 diatasi dengan mengubah konsep kegiatan sesuai dengan kebijakan pada saat pandemi. Kegiatan yang dapat terlaksana yaitu seperti pengadaan alat dan perlengkapan untuk PKD tetap secara rutin dilaksanakan. Beberapa bulan pada saat pandemi untuk kegiatan posyandu dapat dilaksanakan karena pada saat tersebut kegiatan pembatasan dilonggarkan. Pada saat pembatasan diperketat, pembagian makanan tambahan bagi anak dan lansia tetap dilaksanakan

dengan pemberian langsung ke masing-masing rumah anggota. Hal ini untuk tetap menunjang ketercukupan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi gizi buruk. Kegiatan sosialisasi kesehatan pun tetap dilaksanakan menggunakan sarana kendaraan untuk berkeliling Desa Alas Malang untuk memberikan informasi serta edukasi mengenai kesehatan.

Masyarakat menilai, bahwa dengan mengikuti kegiatan di PKD berguna untuk memantau kesehatan dan menjadikan mereka lebih sadar akan kesehatan. Antusiasme masyarakat menjadikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa kebermanfaatannya yang lebih luas di masyarakat.

Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga dapat diketahui ketercapaiannya dari data yang terdapat di PKD. Pada akhir tahun 2020 terdapat 16 anak yang masih berada dalam indikasi gizi buruk, dimana angka ini turun dari awal tahun 2020 yang berjumlah 17 anak. Pada 2021 juga terjadi penurunan jumlah anak yang terindikasi gizi buruk yaitu dari 26 anak pada awal periode menjadi 21 anak pada akhir periode. Kegiatan posyandu yang meskipun tidak dapat terlaksana secara rutin juga dilaksanakan dengan baik, dimana seluruh rangkaian pada saat posyandu terlaksana, pendataan bagi anak dan lansia anggota posyandu juga tercatat dengan baik. Posyandu dapat terlaksana dengan baik juga dapat dilihat dari masyarakat lansia Desa Alas Malang yang terjangkau seluruh akses kesehatannya mulai dari pengecekan, pemberian nutrisi, serta penanganan apabila terdapat masalah kesehatan. Desa Alas Malang juga mendapatkan status Desa bebas ODF dimana masyarakat Desa Alas Malang semakin sadar untuk tidak buang air sembarangan melalui sosialisasi kesehatan yang secara rutin dilakukan oleh bidan serta kader kesehatan desa.

Atas dasar analisis- analisis di atas, penulis menilai untuk pengelolaan dana desa bidang kesehatan yaitu PKD di Desa Alas Malang cukup efektif. Hal ini dikarenakan tidak setiap kegiatan yang direncanakan berhasil terlaksana, namun tetap diusahakan terlaksana meskipun terkendala kebijakan pembatasan dikarenakan adanya pandemi covid-19.

6. Kesimpulan

6.1 Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja dengan value for money untuk pengelolaan dana desa bidang kesehatan (PKD) di Desa Alas Malang telah Ekonomis, Efisien, cukup Efektif. Hal ini terjadi dikarenakan melihat dari penggunaan dana yang telah dianggarkan termanfaatkan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, meskipun terkendala adanya pandemi covid -19 namun tetap diusahakan untuk dapat terselenggara.

6.2 Saran

Terbatasnya kegiatan yang dilaksanakan mengakibatkan tidak terserapnya anggaran dengan baik Kedepannya untuk penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan dana desa terkhusus PKD dapat memaksimalkan anggaran yang telah dianggarkan pada awal periode, apabila terjadi perubahan kebijakan yang mendesak maka perlu dilakukan penyesuaian dalam anggaran tersebut dengan segera

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKD sebisa mungkin mempunyai cakupan yang lebih luas. Cakupan yang lebih luas tersebut dapat berupa partisipasi masyarakat, cakupan lainnya dapat berupa cakupan kegiatan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mental, edukasi seksual dan hubungan keluarga

Kegiatan posyandu baik itu anak maupun lansia, kegiatan posbindu, sosialisasi kesehatan, pelatihan kesehatan di Desa Alas Malang sudah berjalan dengan baik dan diusahakan untuk rutin dilaksanakan. Hal di atas dapat ditingkatkan dengan penyelenggaraan kegiatan yang lebih bervariasi dan menarik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih tertarik dan antusias untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pos kesehatan desa.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih saya haturkan kepada pembimbing lapangan saya Ibu Rini Widianingsih, serta panitia dan penyelenggara MBKM Peneliti Muda antara Universitas Jenderal Soedirman dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah. Semoga penelitian serta kerjasama ini dapat membawa kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas

Referensi

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatanvalue For Moneypada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15.
- Dwi Andayani, R. W. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 15–32.
- Harmain, H., Naser Daulay, A., & Tamara Enre, D. (2019). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Hatta, Z., Arif, E., & Garini, N. T. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. In *Economics, Accounting and Business Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- Indrayani, & Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Kristiani, I., & Supadmini, S. (2018). Analisis Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2016 Dengan Pendekatan Value For Money. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 14, 29–42.
- Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. *Jurnal EMBA*, 2, 1686–1694.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2019).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2014).
- Polii, I., Saerang, D., Tangkuman, S., A Polii, I. R., E Saerang, D. P., Tangkuman, S. J.(2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal EMBA*, 8(4), 781–788.
- Prosperity Index Fifteenth Edition The Legatum Prosperity Index TM 2021 A tool for transformation.* (2021). www.prosperity.comwww.li.com
- Prosperity Index Fourteenth Edition The Legatum Prosperity Index TM 2020 A tool for transformation.* (2020). www.prosperity.comwww.li.com
- Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1).
- Sari, P., Hanum, N., & Salman, M. (2021). Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Pada Sektor Publik (Studi pada SKPD Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(5), 294–303.
- Seran, M. S. B. (2021). Value For Money: Analysis Of The Impact Of Village Government Performance On Village Financial Management In Subun Bestobe Village. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(1), 140–148. <http://ojs.unm.ac.id/iap>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susi Maryanti, C., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2886–2899.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361.
- Yulitiawati, & Rusmidarti. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *JETAP*, 1, 91–109.